



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

1. setelah angka 41 Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 42 dan angka 43, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul

- karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
 33. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
 34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 35. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
 36. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
 37. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - 37a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank sentral.
 38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa.
 41. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 42. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 43. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penetapan perubahan Dana Desa yang diperoleh oleh Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 adalah yang semula Rp371.757.666.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp366.764.832.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan sesuai ayat (3); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (3); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT desa.

- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | KECAMATAN/DESA | JUMLAH DANA DESA (Rp) |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | SUKORAME | |
| | 1. SEMBUNG | 756.830.000 |
| | 2. BANGGLE | 770.735.000 |
| | 3. KEDUNGKUMPUL | 1.114.329.000 |
| | 4. SUKORAME | 1.065.335.000 |
| | 5. MRAGEL | 773.255.000 |
| | 6. KEDUNGREJO | 750.485.000 |
| | 7. SEWOR | 823.941.000 |
| | 8. WEDORO | 757.582.000 |
| | 9. PENDOWOKUMPUL | 758.040.000 |
| | JUMLAH | 7.570.532.000 |
| 2. | BLULUK | |
| | 1. TALUNREJO | 1.139.623.000 |
| | 2. BANJARGONDANG | 751.369.000 |
| | 3. BLULUK | 740.540.000 |
| | 4. CANGKRING | 775.501.000 |
| | 5. BRONJONG | 753.621.000 |
| | 6. SONGOWARENG | 796.637.000 |
| | 7. KUWUREJO | 789.441.000 |
| | 8. SUMBERBANJAR | 809.562.000 |
| | 9. PRIMPEN | 870.928.000 |
| | JUMLAH | 7.427.222.000 |
| 3. | MODO | |
| | 1. JEGREG | 1.180.719.000 |
| | 2. KEDUNGPENGARON | 839.483.000 |
| | 3. SUMBERAGUNG | 746.282.000 |
| | 4. KEDUNGLEREP | 768.216.000 |
| | 5. JATIPAYAK | 812.935.000 |
| | 6. KEDUNGWARAS | 778.649.000 |
| | 7. SIDOMULYO | 915.937.000 |
| | 8. SAMBANGREJO | 752.061.000 |
| | 9. MEDALEM | 741.874.000 |
| | 10. SIDODOWO | 835.955.000 |
| | 11. MOJOREJO | 800.636.000 |
| | 12. SAMBUNGREJO | 788.991.000 |
| | 13. KEDUNGREJO | 747.572.000 |
| | 14. KACANGAN | 745.850.000 |
| | 15. NGUWOK | 710.313.000 |
| | 16. PULE | 808.653.000 |
| 17. YUNGYANG | 763.457.000 | |
| | JUMLAH | 13.737.583.000 |
| 4. | NGIMBANG | |
| | 1. KEDUNGMENTAWAR | 722.128.000 |
| | 2. CERME | 749.849.000 |
| | 3. GEBANGANGKRIK | 847.193.000 |
| | 4. NGASEMLEMAHBANG | 741.510.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|-------------|-----------------|----------------|
| | 5. | SLAHARWOTAN | 901.205.000 |
| | 6. | GANGGANGTINGAN | 775.077.000 |
| | 7. | JEJEL | 752.176.000 |
| | 8. | PURWOKERTO | 788.948.000 |
| | 9. | KAKATPENJALIN | 817.565.000 |
| | 10. | TLEMANG | 765.712.000 |
| | 11. | MENDOGO | 804.085.000 |
| | 12. | LAWAK | 838.080.000 |
| | 13. | DRUJUGURIT | 728.609.000 |
| | 14. | GIRIK | 843.671.000 |
| | 15. | MUNUNGREJO | 810.710.000 |
| | 16. | NGIMBANG | 739.307.000 |
| | 17. | DURIKEDUNGJERO | 759.199.000 |
| | 18. | LAMONGREJO | 837.551.000 |
| | 19. | SENDANGREJO | 1.007.713.000 |
| | JUMLAH | | 15.230.288.000 |
| 5. | BABAT | | |
| | 1. | KARANGKEMBANG | 779.772.000 |
| | 2. | PUCAKWANGI | 714.451.000 |
| | 3. | SOGO | 723.317.000 |
| | 4. | BEDAHAN | 733.914.000 |
| | 5. | TRUNI | 772.878.000 |
| | 6. | GENDONGKULON | 818.628.000 |
| | 7. | PLAOSAN | 981.772.000 |
| | 8. | TREPAN | 745.701.000 |
| | 9. | KURIPAN | 930.205.000 |
| | 10. | KEBALANPELANG | 769.027.000 |
| | 11. | SUMURGENUK | 1.263.376.000 |
| | 12. | GEMBONG | 818.961.000 |
| | 13. | BULUMARGI | 1.040.581.000 |
| | 14. | DATINAWONG | 1.009.650.000 |
| | 15. | KEBALANDONO | 856.561.000 |
| | 16. | PATIHAN | 830.410.000 |
| | 17. | MOROPELANG | 1.039.236.000 |
| | 18. | KEYONGAN | 869.085.000 |
| | 19. | SAMBANGAN | 779.814.000 |
| | 20. | TRITUNGGAL | 830.914.000 |
| | 21. | KEBONAGUNG | 737.411.000 |
| | JUMLAH | | 18.045.664.000 |
| 6. | KEDUNGPRING | | |
| | 1. | DRADAHBLUMBANG | 923.107.000 |
| | 2. | KALEN | 742.408.000 |
| | 3. | MOJODADI | 736.322.000 |
| | 4. | GUNUNGREJO | 766.211.000 |
| | 5. | WARUNGRING | 1.485.374.000 |
| | 6. | JATIDROJOG | 727.498.000 |
| | 7. | KRADENANREJO | 807.871.000 |
| | 8. | KANDANGREJO | 709.380.000 |
| | 9. | KEDUNGPRING | 743.563.000 |
| | 10. | TLANAK | 740.772.000 |
| | 11. | SUKOMALO | 756.349.000 |
| | 12. | MLATI | 742.681.000 |
| | 13. | KARANGCANGKRING | 717.759.000 |
| | 14. | MEKANDEREJO | 904.067.000 |
| | 15. | BANJAREJO | 730.690.000 |
| | 16. | SIDOBANGUN | 938.479.000 |
| | 17. | BLAWIREJO | 736.339.000 |
| | 18. | MAINDU | 731.907.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|--------|------------|----------------|----------------|
| | 19. | TENGGEREJO | 796.481.000 |
| | 20. | MAJENANG | 811.669.000 |
| | 21. | SIDOMLANGEAN | 736.668.000 |
| | 22. | NGLEBUR | 743.717.000 |
| | 23. | SUMENGKO | 742.258.000 |
| | JUMLAH | | 18.471.570.000 |
| 7. | BRONDONG | | |
| | 1. | LOHGUNG | 972.053.000 |
| | 2. | LABUHAN | 828.732.000 |
| | 3. | SIDOMUKTI | 962.924.000 |
| | 4. | BRENGKOK | 883.199.000 |
| | 5. | TLOGORETNO | 741.909.000 |
| | 6. | SENDANGHARJO | 907.106.000 |
| | 7. | LEMBOR | 860.919.000 |
| | 8. | SEDAYULAWAS | 1.225.514.000 |
| | 9. | SUMBERAGUNG | 834.923.000 |
| JUMLAH | | 8.217.279.000 | |
| 8. | LAREN | | |
| | 1. | DATENG | 780.877.000 |
| | 2. | JABUNG | 756.556.000 |
| | 3. | KEDUYUNG | 757.499.000 |
| | 4. | CENTINI | 764.271.000 |
| | 5. | DURIKULON | 797.721.000 |
| | 6. | PESANGGRAHAN | 737.447.000 |
| | 7. | GELAP | 815.867.000 |
| | 8. | MOJOASEM | 767.450.000 |
| | 9. | SISER | 760.020.000 |
| | 10. | BULUTIGO | 796.620.000 |
| | 11. | PELANGWOT | 840.755.000 |
| | 12. | LAREN | 877.801.000 |
| | 13. | GAMPANGSEJATI | 759.778.000 |
| | 14. | TAMANPRIJEG | 824.506.000 |
| | 15. | KARANGTAWAR | 727.218.000 |
| | 16. | TEJOASRI | 840.115.000 |
| | 17. | GODOG | 827.084.000 |
| | 18. | BULUBRANGSI | 754.282.000 |
| | 19. | KARANGWUNGULOR | 854.504.000 |
| | 20. | BRANGSI | 732.216.000 |
| JUMLAH | | 15.772.587.000 | |
| 9. | SEKARAN | | |
| | 1. | BESUR | 768.697.000 |
| | 2. | TITIK | 712.188.000 |
| | 3. | KENDAL | 780.232.000 |
| | 4. | KETING | 736.673.000 |
| | 5. | NGARUM | 738.440.000 |
| | 6. | KEBALANKULON | 728.574.000 |
| | 7. | KUDIKAN | 796.646.000 |
| | 8. | JUGO | 756.915.000 |
| | 9. | MANYAR | 797.530.000 |
| | 10. | TROSONO | 883.330.000 |
| | 11. | LATEK | 771.690.000 |
| | 12. | MIRU | 798.866.000 |
| | 13. | SEKARAN | 941.785.000 |
| | 14. | MORO | 698.482.000 |
| | 15. | KARANG | 710.725.000 |
| | 16. | KEMBANGAN | 714.513.000 |
| | 17. | SIMAN | 716.570.000 |
| 18. | BULUTENGER | 891.894.000 | |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|---------|------------------|----------------|
| | 19. | PORODESO | 710.161.000 |
| | 20. | BUGEL | 721.690.000 |
| | 21. | SUNGEGENENG | 777.700.000 |
| | JUMLAH | | 16.153.301.000 |
| 10. | MADURAN | | |
| | 1. | DURIWETAN | 732.546.000 |
| | 2. | TAJI | 780.790.000 |
| | 3. | BRUMBUN | 735.986.000 |
| | 4. | SIWURAN | 716.246.000 |
| | 5. | KLAGENSRAMPAT | 774.872.000 |
| | 6. | PANGEAN | 761.705.000 |
| | 7. | MADURAN | 707.643.000 |
| | 8. | JANGKUNGSOMO | 717.525.000 |
| | 9. | PARENGAN | 709.727.000 |
| | 10. | PANGKATREJO | 736.430.000 |
| | 11. | KANUGRAHAN | 913.808.000 |
| | 12. | GUMANTUK | 828.436.000 |
| | 13. | NGAYUNG | 754.528.000 |
| | 14. | PRINGGOBOYO | 729.651.000 |
| | 15. | GEDANGAN | 769.325.000 |
| | 16. | TURI | 787.254.000 |
| | 17. | BLUMBANG | 718.049.000 |
| | JUMLAH | | 12.874.521.000 |
| 11. | SAMBENG | | |
| | 1. | SIDOKUMPUL | 782.218.000 |
| | 2. | PASARLEGI | 901.874.000 |
| | 3. | SEMAMPIREJO | 761.571.000 |
| | 4. | WATESWINANGUN | 794.239.000 |
| | 5. | SUMBERSARI | 748.104.000 |
| | 6. | PATAAN | 841.684.000 |
| | 7. | TENGGIRING | 775.417.000 |
| | 8. | GARUNG | 744.654.000 |
| | 9. | WONOREJO | 910.361.000 |
| | 10. | ARDIREJO | 819.283.000 |
| | 11. | SEKIDANG | 738.358.000 |
| | 12. | KEDUNGWANGI | 755.745.000 |
| | 13. | JATIPANDAK | 816.233.000 |
| | 14. | CANDISARI | 780.630.000 |
| | 15. | NOGOJATISARI | 745.819.000 |
| | 16. | PAMOTAN | 838.330.000 |
| | 17. | WUDI | 746.743.000 |
| | 18. | BARUREJO | 733.049.000 |
| | 19. | KEDUNGBANJAR | 704.861.000 |
| | 20. | GEMPOLMANIS | 745.846.000 |
| | 21. | SELOREJO | 916.659.000 |
| | 22. | KRETERANGGON | 870.544.000 |
| | JUMLAH | | 17.472.222.000 |
| 12. | SUGIO | | |
| | 1. | SIDOBOGEM | 725.475.000 |
| | 2. | KALITENGAH | 845.192.000 |
| | 3. | KEDUNGDADI | 807.364.000 |
| | 4. | SIDOREJO | 890.594.000 |
| | 5. | KEDUNGBANJAR | 742.910.000 |
| | 6. | BEDINGIN | 883.435.000 |
| | 7. | BAKALREJO | 741.557.000 |
| | 8. | GONDANGLOR | 874.247.000 |
| | 9. | PANGKATREJO | 746.016.000 |
| | 10. | KARANGSAMBIGALIH | 789.066.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|----------|------------------|----------------|
| | 11. | SUPENUH | 850.735.000 |
| | 12. | LEBAKADI | 794.766.000 |
| | 13. | DEKETAGUNG | 785.971.000 |
| | 14. | JUBELLOR | 798.619.000 |
| | 15. | SUGIO | 934.056.000 |
| | 16. | DALIWANGUN | 748.635.000 |
| | 17. | JUBELKIDUL | 814.576.000 |
| | 18. | LAWANGANAGUNG | 1.064.961.000 |
| | 19. | KALIPANG | 723.869.000 |
| | 20. | GERMAN | 764.122.000 |
| | 21. | SEKARBAGUS | 851.334.000 |
| | JUMLAH | | 17.177.500.000 |
| 13. | PUCUK | | |
| | 1. | PUCUK | 709.535.000 |
| | 2. | GEMPOLPADING | 733.916.000 |
| | 3. | KESAMBI | 720.107.000 |
| | 4. | PLOSOSETRO | 732.466.000 |
| | 5. | WANAR | 887.235.000 |
| | 6. | KARANGTINGGIL | 709.904.000 |
| | 7. | WARUKULON | 787.374.000 |
| | 8. | WARUWETAN | 712.458.000 |
| | 9. | KEDALI | 729.035.000 |
| | 10. | PAJI | 762.124.000 |
| | 11. | SUMBERJO | 749.655.000 |
| | 12. | CUNGKUP | 783.711.000 |
| | 13. | BUGOHARJO | 746.880.000 |
| | 14. | NGAMBEG | 778.354.000 |
| | 15. | BABATKUMPUL | 869.977.000 |
| | 16. | TANGGUNGAN | 780.165.000 |
| | 17. | PADENGANPLOSO | 909.861.000 |
| | JUMLAH | | 13.102.757.000 |
| 14. | PACIRAN | | |
| | 1. | KANDANGSEMANGKON | 816.686.000 |
| | 2. | PACIRAN | 958.124.000 |
| | 3. | SUMURGAYAM | 921.311.000 |
| | 4. | SENDANGAGUNG | 1.009.558.000 |
| | 5. | SENDANGDUWUR | 895.553.000 |
| | 6. | TUNGGUL | 927.650.000 |
| | 7. | KRANJI | 846.011.000 |
| | 8. | DRAJAT | 776.611.000 |
| | 9. | BANJARWATI | 904.548.000 |
| | 10. | KEMANTREN | 760.824.000 |
| | 11. | SIDOKELAR | 712.285.000 |
| | 12. | TLOGOSADANG | 701.919.000 |
| | 13. | PALOH | 737.539.000 |
| | 14. | WERU | 700.906.000 |
| | 15. | SIDOKUMPUL | 684.496.000 |
| | 16. | WARULOR | 729.569.000 |
| | JUMLAH | | 13.083.590.000 |
| 15. | SOLOKURO | | |
| | 1. | DADAPAN | 880.147.000 |
| | 2. | TEBLURU | 796.669.000 |
| | 3. | SUGIHAN | 749.729.000 |
| | 4. | TENGGULUN | 724.422.000 |
| | 5. | PAYAMAN | 915.098.000 |
| | 6. | SOLOKURO | 758.123.000 |
| | 7. | TAKERHARJO | 781.934.000 |
| | 8. | DAGAN | 956.369.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|--------------|---------------|----------------|
| | 9. | BANYUBANG | 716.642.000 |
| | 10. | BLURI | 703.538.000 |
| | JUMLAH | | 7.982.671.000 |
| 16. | MANTUP | | |
| | 1. | SUKOBENDU | 868.229.000 |
| | 2. | TUNGGUNJAGIR | 816.717.000 |
| | 3. | SUMBERBENDO | 761.682.000 |
| | 4. | MANTUP | 831.181.000 |
| | 5. | KEDUKBEMBEM | 771.638.000 |
| | 6. | SUMBERDADI | 739.248.000 |
| | 7. | KEDUNGSOKO | 773.800.000 |
| | 8. | TUGU | 725.127.000 |
| | 9. | SUKOSARI | 797.124.000 |
| | 10. | SUMBERAGUNG | 722.310.000 |
| | 11. | SIDOMULYO | 734.019.000 |
| | 12. | MOJOSARI | 767.905.000 |
| | 13. | PLABUHANREJO | 784.900.000 |
| | 14. | SUMBERKEREK | 919.908.000 |
| | 15. | RUMPUK | 778.810.000 |
| | JUMLAH | | 11.792.598.000 |
| 17. | SUKODADI | | |
| | 1. | SIWALANREJO | 710.788.000 |
| | 2. | KEBONSARI | 712.886.000 |
| | 3. | SUKOLILO | 791.568.000 |
| | 4. | PAJANGAN | 737.927.000 |
| | 5. | KADUNGREMBUG | 807.048.000 |
| | 6. | SUMBERAGUNG | 734.815.000 |
| | 7. | SUKODADI | 870.755.000 |
| | 8. | SUMBERAJI | 728.087.000 |
| | 9. | MENONGO | 741.087.000 |
| | 10. | MADULEGI | 845.617.000 |
| | 11. | BANJAREJO | 779.418.000 |
| | 12. | PLUMPANG | 769.915.000 |
| | 13. | BANDUNGSARI | 823.073.000 |
| | 14. | SIDOGEMBUL | 929.632.000 |
| | 15. | BALONGTAWUN | 802.250.000 |
| | 16. | GEDANGAN | 879.005.000 |
| | 17. | TLOGOREJO | 712.497.000 |
| | 18. | BATURONO | 764.263.000 |
| | 19. | SURABAYAN | 705.258.000 |
| | 20. | SUGIHREJO | 756.652.000 |
| | JUMLAH | | 15.602.541.000 |
| 18. | KARANGGENENG | | |
| | 1. | BANTENGPutih | 719.129.000 |
| | 2. | KARANGREJO | 718.743.000 |
| | 3. | LATUKAN | 764.267.000 |
| | 4. | GUCI | 746.625.000 |
| | 5. | KALIGERMAN | 711.414.000 |
| | 6. | SUNGELEBAK | 889.321.000 |
| | 7. | PRIJEKNGABLAK | 710.528.000 |
| | 8. | TRACAL | 738.559.000 |
| | 9. | SONOADI | 695.053.000 |
| | 10. | KALANGANYAR | 758.401.000 |
| | 11. | BANJARMADU | 811.441.000 |
| | 12. | KENDALKEMLAGI | 779.159.000 |
| | 13. | KAWISTOLEGI | 755.241.000 |
| | 14. | JAGRAN | 724.503.000 |
| | 15. | KARANGWUNGU | 719.043.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|-------------|---------------|----------------|
| | 16. | SUMBERWUDI | 842.985.000 |
| | 17. | KARANGGENENG | 835.126.000 |
| | 18. | MERTANI | 723.016.000 |
| | JUMLAH | | 13.642.554.000 |
| 19. | KEMBANGBAHU | | |
| | 1. | TLOGOAGUNG | 757.832.000 |
| | 2. | KEDUNGMEGARIH | 853.378.000 |
| | 3. | SIDOMUKTI | 766.334.000 |
| | 4. | SUKOSONGO | 733.633.000 |
| | 5. | KALIWATES | 760.037.000 |
| | 6. | KEDUNGASRI | 877.698.000 |
| | 7. | DOYOMULYO | 739.614.000 |
| | 8. | KEMBANGBAHU | 721.209.000 |
| | 9. | MAOR | 763.015.000 |
| | 10. | MORONYAMPLUNG | 759.959.000 |
| | 11. | MANGKUJAJAR | 791.156.000 |
| | 12. | PUTER | 864.505.000 |
| | 13. | PELANG | 821.735.000 |
| | 14. | DUMPIAGUNG | 810.286.000 |
| | 15. | RANDUBENER | 747.491.000 |
| | 16. | LOPANG | 1.305.666.000 |
| | 17. | GINTUNGAN | 778.894.000 |
| | 18. | KATEMAS | 735.904.000 |
| | JUMLAH | | 14.588.346.000 |
| 20. | KALITENGAH | | |
| | 1. | PUCANGRO | 714.299.000 |
| | 2. | PUCANGTELU | 724.162.000 |
| | 3. | SOMOSARI | 710.753.000 |
| | 4. | JELAKCATUR | 856.212.000 |
| | 5. | MUNGLI | 705.945.000 |
| | 6. | PENGANGSALAN | 707.071.000 |
| | 7. | DIBEE | 690.351.000 |
| | 8. | BUTUNGAN | 828.322.000 |
| | 9. | LUKREJO | 763.731.000 |
| | 10. | TIWET | 699.440.000 |
| | 11. | BLAJO | 743.256.000 |
| | 12. | KALITENGAH | 732.028.000 |
| | 13. | GAMBUHAN | 954.562.000 |
| | 14. | CLURING | 707.401.000 |
| | 15. | BOJOASRI | 923.587.000 |
| | 16. | KEDIREN | 726.261.000 |
| | 17. | KULURAN | 759.031.000 |
| | 18. | CANDITUNGGAL | 717.208.000 |
| | 19. | SUGIHWARAS | 733.582.000 |
| | 20. | TUNJUNGMEKAR | 685.303.000 |
| | JUMLAH | | 15.082.505.000 |
| 21. | TURI | | |
| | 1. | GEGER | 900.450.000 |
| | 2. | BADURAME | 792.654.000 |
| | 3. | KARANGWEDORO | 755.670.000 |
| | 4. | WANGUNREJO | 720.989.000 |
| | 5. | PUTATKUMPUL | 833.268.000 |
| | 6. | KEBEN | 795.176.000 |
| | 7. | SUKOANYAR | 851.643.000 |
| | 8. | KEMLAGIGEDE | 765.011.000 |
| | 9. | TURI | 720.763.000 |
| | 10. | KEMLAGILOR | 774.846.000 |
| | 11. | SUKOREJO | 857.300.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|----------------|------------------|----------------|
| | 12. | TAWANGREJO | 755.630.000 |
| | 13. | BAMBANG | 712.279.000 |
| | 14. | POMAHANJANGGAN | 783.494.000 |
| | 15. | TAMBAKPLOSO | 731.077.000 |
| | 16. | BALUN | 810.318.000 |
| | 17. | NGUJUNGREJO | 771.824.000 |
| | 18. | KEPUDIBENER | 914.939.000 |
| | 19. | GEDONGBOYOUNTUNG | 765.949.000 |
| | JUMLAH | | 15.013.280.000 |
| 22. | LAMONGAN | | |
| | 1. | RANCANGKENCONO | 755.167.000 |
| | 2. | KARANGLANGIT | 858.065.000 |
| | 3. | PANGKATREJO | 791.038.000 |
| | 4. | KEBET | 705.876.000 |
| | 5. | SENDANGREJO | 752.666.000 |
| | 6. | SUMBERJO | 754.839.000 |
| | 7. | TANJUNG | 693.717.000 |
| | 8. | PLOSOWAHYU | 852.943.000 |
| | 9. | WAJIK | 721.950.000 |
| | 10. | KRAMAT | 732.339.000 |
| | 11. | MADE | 877.000.000 |
| | 12. | SIDOMUKTI | 687.541.000 |
| | JUMLAH | | 9.183.141.000 |
| 23. | TIKUNG | | |
| | 1. | WONOKROMO | 763.099.000 |
| | 2. | SOKO | 846.987.000 |
| | 3. | GUMININGREJO | 856.653.000 |
| | 4. | BAKALANPULE | 793.496.000 |
| | 5. | TAKERANKLATING | 781.377.000 |
| | 6. | KELORARUM | 742.222.000 |
| | 7. | JOTOSANUR | 935.973.000 |
| | 8. | PENGUMBULANADI | 751.173.000 |
| | 9. | JATIREJO | 909.114.000 |
| | 10. | DUKUHAGUNG | 742.081.000 |
| | 11. | TAMBAKRIGADUNG | 760.979.000 |
| | 12. | BOTOPUTIH | 764.017.000 |
| | 13. | BALONGWANGI | 827.285.000 |
| | JUMLAH | | 10.474.456.000 |
| 24. | KARANGBINANGUN | | |
| | 1. | WARUK | 698.763.000 |
| | 2. | SUKOREJO | 741.169.000 |
| | 3. | KARANGANOM | 727.547.000 |
| | 4. | SOMOWINANGUN | 856.903.000 |
| | 5. | KETAPANGTELU | 1.040.842.000 |
| | 6. | MAYONG | 833.471.000 |
| | 7. | PALANGAN | 746.619.000 |
| | 8. | BLAWI | 712.724.000 |
| | 9. | BANJAREJO | 810.556.000 |
| | 10. | PUTATBANGAH | 1.007.103.000 |
| | 11. | BANYUURIP | 712.421.000 |
| | 12. | PENDOWOLIMO | 727.794.000 |
| | 13. | BARANGGAYAM | 905.576.000 |
| | 14. | WATANGPANJANG | 759.253.000 |
| | 15. | SAMBOPINGGIR | 711.010.000 |
| | 16. | PRIYOSO | 708.046.000 |
| | 17. | WINDU | 705.809.000 |
| | 18. | BOGOBABADAN | 718.621.000 |
| | 19. | GAWEREJO | 763.512.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|----------|----------------|----------------|
| | 20. | KURO | 1.172.873.000 |
| | 21. | KARANGBINANGUN | 715.689.000 |
| | JUMLAH | | 16.776.301.000 |
| 25. | DEKET | | |
| | 1. | SIDOREJO | 715.669.000 |
| | 2. | DLANGGU | 764.083.000 |
| | 3. | LALADAN | 731.084.000 |
| | 4. | DEKETKULON | 720.472.000 |
| | 5. | DEKETWETAN | 788.431.000 |
| | 6. | SUGIHWARAS | 919.964.000 |
| | 7. | DINOYO | 726.467.000 |
| | 8. | SIDOMULYO | 791.461.000 |
| | 9. | REJOSARI | 724.619.000 |
| | 10. | PANDANPANCUR | 728.119.000 |
| | 11. | SIDOBINANGUN | 753.323.000 |
| | 12. | BABATAGUNG | 719.618.000 |
| | 13. | TUKKERTO | 747.236.000 |
| | 14. | WEDUNI | 720.041.000 |
| | 15. | REJOTENGAH | 721.357.000 |
| | 16. | SRIRANDE | 863.062.000 |
| | 17. | PLOSOBUDEN | 727.680.000 |
| | JUMLAH | | 12.862.686.000 |
| 26. | GLAGAH | | |
| | 1. | SOKO | 705.308.000 |
| | 2. | MOROCALAN | 721.833.000 |
| | 3. | GEMPOLPENDOWO | 691.150.000 |
| | 4. | PASI | 739.314.000 |
| | 5. | RAYUNGGUMUK | 735.928.000 |
| | 6. | MENGANTI | 737.938.000 |
| | 7. | MARGOANYAR | 699.123.000 |
| | 8. | BEGAN | 697.158.000 |
| | 9. | MENDOGO | 709.667.000 |
| | 10. | KENTONG | 1.091.038.000 |
| | 11. | SUDANGAN | 706.305.000 |
| | 12. | MEDANG | 1.045.479.000 |
| | 13. | DUDUKLOR | 710.641.000 |
| | 14. | GLAGAH | 694.649.000 |
| | 15. | WANGEN | 1.008.630.000 |
| | 16. | TANGGUNGPRIGEL | 918.380.000 |
| | 17. | KARANGAGUNG | 703.143.000 |
| | 18. | BANGKOK | 832.345.000 |
| | 19. | JATIRENGGO | 815.759.000 |
| | 20. | BAPUHBARU | 771.933.000 |
| | 21. | BAPUHBANDUNG | 908.905.000 |
| | 22. | MELUNTUR | 789.670.000 |
| | 23. | KONANG | 707.572.000 |
| | 24. | DUKUHTUNGGAL | 718.315.000 |
| | 25. | PANGGANG | 760.854.000 |
| | 26. | WONOREJO | 736.700.000 |
| | 27. | WEDORO | 698.414.000 |
| | 28. | KARANGTURI | 712.156.000 |
| | 29. | MELUWUR | 710.596.000 |
| | JUMLAH | | 22.478.903.000 |
| 27. | SARIREJO | | |
| | 1. | KEDUNGKUMPUL | 763.186.000 |
| | 2. | DERMOLEMAHBANG | 808.226.000 |
| | 3. | SIMBATAN | 866.856.000 |
| | 4. | SUMBERJO | 772.897.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--------------------|-----------------|
| | 5. CANGGAH | 721.187.000 |
| | 6. BERU | 734.847.000 |
| | 7. TAMBAKMENJANGAN | 788.711.000 |
| | 8. GEMPOLTUKMLOKO | 744.966.000 |
| | 9. SARIREJO | 747.358.000 |
| | JUMLAH | 6.948.234.000 |
| JUMLAH TOTAL | | 366.764.832.000 |

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001